PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 32 TAHUN 2026

# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

# DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang. . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan. . .

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);

20. Peraturan. . .

20. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 29 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2027 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2027 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Batam Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberkan kepada Perangkat Daerah otonom untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2026.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN
b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA
c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
e. BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
f. BAB VI PENUTUP

Pasal 3

Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan menjadi Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

a. acuan penyusunan RKA-Perangkat Daerah;
b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2027; dan
c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 juli 2026

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2026 NOMOR 1721

# KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 Dinas Perhubungan Kota Batam disusun sebagai bahan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2027 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kota Batam secara signifikan.

Rencana Kerja (Renja) memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (RENJA) ini menjadi acuan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dan dapat diselesai dengan baik dan tepat waktu untuk periode satu tahun.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

**Batam, 22 Juli 2026**
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**
**KOTA BATAM**

**Drs. LEO PUTRA, A.P., M.Si**
Pembina Utama Muda
**NIP.19750806 199501 1 001**

# DAFTAR ISI

Hal

**KATA PENGANTAR** ..... **i**
**DAFTAR ISI** ..... **ii**
**DAFTAR TABEL** ..... **iv**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **v**

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang ..... 1
1.2. Landasan Hukum ..... 4
1.3. Maksud dan Tujuan..... 8
1.4. Sistematika Penulisan..... 8

**BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan (IKU dan IKK Tahun 2025) Dinas Perhubungan Kota Batam ..... 10
2.2 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025..... 13
2.3. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan ..... 13
2.4. Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD ..... 27
2.5. Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat ..... 28

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN**

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana kerja Dinas Perhubungan ..... 29
3.2. Arah dan Kebijakan Tahun 2027 ..... 30

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN**

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027 ..... 33
4.2. Dukungan Program Renja Dinas Perhubungan Tahun 2027 dalam Menanggulangi Kemiskinan ..... 46

**BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .. 48**

**BAB VI PENUTUP**

5.1. Catatan Penting..... 50

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan ..... 51

5.3. Rencana Tindak Lanjut..... 52

# DAFTAR TABEL

Hal

II.1. Capaian atas Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 ..... 11

II.2. Capaian atas Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 ..... 12

II.3. Capaian atas Target Kinerja Program Dinas Pehubungan Kota Batam Tahun 2025..... 14

II.4. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam s/d Tahun 2025 ..... 18

II.5. Telaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2027 pada Dinas Perhubungan Kota Batam ..... 27

III.1. Target Tujuan dan Sasaran Tahun 2027 Dinas Perhubungan Kota Batam ..... 29

III.2. Dukungan Program Dinas Perhubungan Kota Batam Terhadap Prioritas Nasional ..... 31

III.3. Dukungan Program Dinas Perhubungan Kota Batam Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau ..... 32

IV.1. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2027..... 34

IV.2. Dukungan Program Renja Dinas Perhubungan Kota Batam Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2027..... 47

V.1. Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2027 Dinas Perhubungan Kota Batam ..... 48

V.2. Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027 Dinas Perhubungan Kota Batam ..... 48

V.3. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027 Dinas Perhubungan Kota Batam ..... 49

# DAFTAR GAMBAR

Hal

1.1. Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah..... 3

1.2. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..... 4

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

### 1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan Perhubungan, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

### 1.1.2. Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana kerja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan Renja

b. Penyusunan Rancangan Awal Renja

c. Penyusunan Rancangan Renja

d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah

e. Perumusan Rancangan Akhir Renja

f. Penetapan Renja.

Rencana kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

**Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renja**

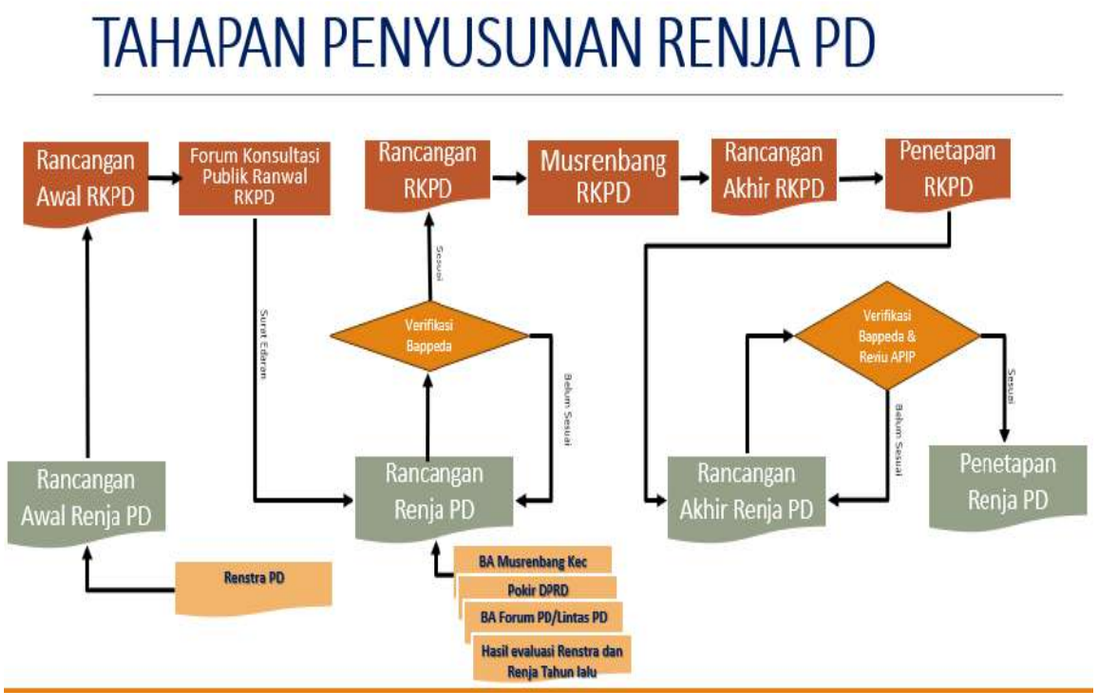


### 1.1.3. Keterkaitan Antara Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Rencana kerja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 1.2. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

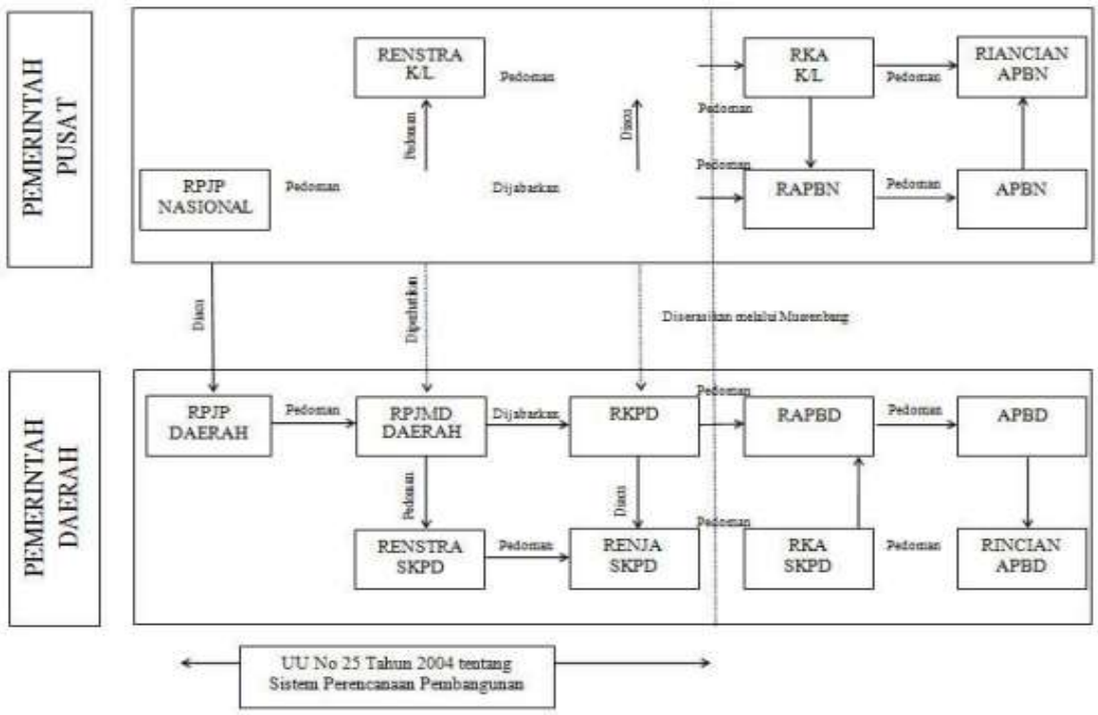


## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah No.69);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
19. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 73 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1643);
21. Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2026 Nomor 1718).

## 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2027 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2027 secara terarah, terukur, dan akuntabel.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam :

1. Menjabarkan sasaran dan arah kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029 serta RKPD Kota Batam Tahun 2027 ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan;
2. Menyediakan dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027;
3. Menyelaraskan program prioritas Dinas Perhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat/pokok-pokok pikiran DPRD;
4. Menjadi tolok ukur dan instrumen evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan pada Tahun Anggaran 2027.

## 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penulisan, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Memuat evaluasi capaian kinerja bidang urusan, evaluasi capaian SPM, rumusan permasalahan dan isu strategis, telaah pokok-pokok pikiran DPRD, dan inovasi bidang urusan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan kebijakan nasional/provinsi/kota, tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan Tahun 2027.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

memuat rincian program, kegiatan, sub kegiatan, target kinerja, dan pagu indikatif Tahun 2027.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027.

BAB VI PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan, catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

# BAB II
# HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TAHUN LALU

## 2.1. EVALUASI CAPAIAN KINERJA BIDANG URUSAN (IKU dan IKK TAHUN 2025) DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Pemerintah Kota Batam memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang terkait perhubungan, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di bidang perhubungan, termasuk pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan. Pembangunan urusan perhubungan diarahkan untuk meningkatkan konektivitas, keselamatan transportasi, serta kualitas pelayanan transportasi darat dan laut guna mendukung mobilitas masyarakat dan kelancaran distribusi barang dan jasa.

Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam pada Tahun 2025 dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021–2030. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan, sekaligus menjadi dasar penilaian efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perhubungan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian pada akhir Tahun 2025. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran strategis.

**TABEL II.1.**
**CAPAIAN ATAS TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**
**TAHUN 2025**

| NO. | SASARAN STRATEGIS | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET CAPAIAN 2025 | REALISASI CAPAIAN 2025 | CAPAIAN KINERJA (%) | STATUS KINERJA RKPD 2025 | TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2030) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasio Konektivitas Darat | Nilai | 0,909 | 0,900 | 0,900 | 100% | ST | 0,909 |
| 2 | Rasio Konektivitas Laut | Nilai | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 100% | ST | 0,750 |
| 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan | Nilai | 90,420 | 91,465 | 89,770 | 98% | ST | 90,58 |

Sebagai penjabaran lebih rinci dari Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota, indikator kinerja utama diukur melalui tiga komponen sebagaimana disajikan pada tabel kedua:

1. Rasio Konektivitas Darat, meningkat dari baseline 2024 sebesar 0,818 menjadi realisasi 0,900 pada tahun 2025, terhadap target sebesar 0,909. Capaian kinerja sebesar 99% menunjukkan progres positif menuju target akhir periode Renstra 2030 sebesar 0,909, yang praktis telah hampir tercapai lebih cepat dari jadwal.
2. Rasio Konektivitas Laut, dengan baseline, target, dan realisasi yang konsisten pada angka 0,583, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Namun demikian, dengan target akhir periode Renstra 2030 sebesar 0,750, diperlukan upaya peningkatan yang lebih signifikan pada tahun-tahun mendatang untuk mengejar selisih sebesar 0,167 poin.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Dinas Perhubungan, meningkat dari baseline 90,220 dengan target 90,420 dan realisasi 89,770, sehingga capaian kinerja sebesar 99%. Meskipun realisasi sedikit di bawah target, nilai indeks tersebut masih berada pada kategori sangat memuaskan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai ketercapaian sasaran pembangunan daerah. Berada di bawah IKU dalam hierarki indikator kinerja, IKK mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dan program pemerintah dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. IKK mencerminkan kinerja sektor atau bidang tertentu yang menjadi bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Dalam dokumen perencanaan, IKK menjadi alat evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

**TABEL II.2.**
**CAPAIAN ATAS TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)**
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**
**TAHUN 2025**

| NO. | SASARAN STRATEGIS | SATUAN | TARGET CAPAIAN 2025 | REALISASI CAPAIAN 2025 | CAPAIAN KINERJA (%) | STATUS KINERJA RKPD 2025 | TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2030) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota | Rasio | 0,811 | 0,805 | 99% | ST | 0,861 |
| 2 | Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota | Persentase | 15% | 19% | 127% | ST | 100% |
| 3 | Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan | Persentase | 100% | 100% | 100% | ST | 100% |

Berdasarkan Tabel II.2 terhadap capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK), terdapat tiga sasaran strategis yang diukur pada Tahun 2025:

1. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota, dengan target capaian sebesar 0,811 dan realisasi sebesar 0,805, sehingga capaian kinerja mencapai 99%. Meskipun belum mencapai 100%, capaian ini masuk dalam kategori status kinerja "Sesuai Target" (ST) mengingat deviasi yang sangat kecil terhadap target yang ditetapkan.

2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota, dengan target 15% berhasil direalisasikan sebesar 19%, sehingga capaian kinerja mencapai 127%. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pemenuhan kelengkapan sarana jalan.
3. Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan**,** dengan target dan realisasi yang sama-sama mencapai 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau tercapai penuh sesuai target.

## 2.2. EVALUASI CAPAIAN SPM TAHUN 2023-2025

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, urusan perhubungan tidak termasuk dalam 6 (enam) jenis pelayanan dasar yang wajib dipenuhi melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Oleh karena itu, evaluasi capaian SPM Tahun 2023–2025 tidak disajikan pada dokumen ini, dan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## 2.3. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 dan capaian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029 dilakukan dengan

membandingkan target Renstra Tahun 2027, realisasi sampai dengan Tahun 2024, target dan realisasi Renja Tahun 2025, target Renja Tahun 2026, serta perkiraan realisasi capaian target Renstra sampai dengan Tahun 2026, sebagaimana disajikan pada Tabel T.C-29. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan realisasi kinerja 100% dan serapan anggaran 89,97% dari pagu Rp127.483.174.156,00, sehingga dikategorikan Tinggi (T), realisasi capaian target Program, disajikan pada Tabel berikut.

**TABEL II.3.**
**CAPAIAN ATAS TARGET KINERJA PROGRAM**
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**
**TAHUN 2025**

| KODE | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025 YANG DI EVALUASI | | CAPAIAN TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025 | | PERSENTASE CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025 | | KATEGORI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp | KINERJA | Rp |
| 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | |
| 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 40.240.637.925 | | 33.690.312.636 | | 83,72% | | T |
| | | Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD | Nilai | 90,42 | | 89,77 | | 99% | | ST | |
| | | Nilai SAKIP PD | Nilai | 72,81 | | 72,81 | | 100% | | ST | |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | 81.065.369.383 | | 75.265.529.634 | | 92,85% | | ST |
| | | Persentase peningkatan sarana dan prarasana perhubungan darat yang tersedia | Persentase | 63 | | 65 | | 103% | | ST | |
| | | Persentase Peningkatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum | Persentase | 5 | | 34,27 | | 685% | | ST | |
| | | Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang lulus uji KIR | Persentase | 50 | | 47,41 | | 95% | | ST | |
| | | Persentase peningkatan jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam) | Persentase | 10 | | 8,6 | | 86% | | ST | |
| 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | 6.177.166.848 | | 5.762.996.401 | | | | ST |
| | | Persentase peningkatan jumlah penumpang Transportasi Laut yang dilayani oleh Dinas Perhubungan | Persentase | 130 | | 147 | | 113% | | ST | |
| | | Persentase Sarana dan Prasaana Perhubungan Laut yang tersedia | Persentase | 69 | | 68,89 | | 100% | | ST | |
| | | | | | 127.483.174.156 | | 114.718.838.671 | | 89,99% | | |

Uraian evaluasi per program adalah sebagai berikut:

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Kinerja program ini diukur melalui 2 (dua) indikator utama. Nilai SAKIP Dinas Perhubungan pada Tahun 2025 ditargetkan 71,78 dan terealisasi 71,78 (capaian 100%), meningkat dari realisasi Tahun 2024 sebesar 70,03, dengan target Renstra Tahun 2027 sebesar 74,53. Sementara itu, Indeks Pelayanan Kesekretariatan Dinas Perhubungan ditargetkan 90,42 pada Tahun 2025 dan terealisasi 89,77 (capaian 99%), sedikit di bawah target namun tetap menunjukkan tren positif menuju target Renstra Tahun 2027 sebesar 90,48. Pada tataran kegiatan, seluruh indikator kegiatan penunjang — administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, pemeliharaan barang milik daerah, dan peningkatan pelayanan BLUD — telah terealisasi 100% sesuai target, kecuali kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang pada Tahun 2024 baru terealisasi 90,55% sebelum mencapai 100% pada Tahun 2025.

2) **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

   Program ini memiliki 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian yang bervariasi. Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia terealisasi 65% dari target 63% (capaian 103%), melampaui target menuju sasaran Renstra Tahun 2027 sebesar 80%. Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang lulus uji KIR ditargetkan 50% namun hanya terealisasi 47% (capaian 94%), disebabkan masih banyaknya pemilik kendaraan wajib uji yang belum memiliki kesadaran melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor. Persentase peningkatan jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani Trans Batam ditargetkan 10% dan terealisasi 8,6% (capaian 86%), dipengaruhi keterbatasan prasarana halte/shelter termasuk

pembongkaran sejumlah halte akibat pembangunan infrastruktur jalan belum tersedianya angkutan pengumpan (feeder), serta peralihan sebagian masyarakat ke transportasi daring (online); meski demikian, indikator turunannya yaitu persentase tingkat pelayanan operasional Bus Trans Batam justru melampaui target (42% terhadap target 40%, capaian 105%). Persentase peningkatan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum ditargetkan hanya 5% namun terealisasi 34% (capaian 680%), didorong optimalisasi kinerja UPTD Pelayanan Parkir Kota Batam, meskipun indikator kegiatan penambahan Satuan Ruang Parkir (SRP) baru baru terealisasi 593 SRP dari target 1.147 SRP (capaian 52%) yang perlu menjadi perhatian pada Tahun 2027. Kegiatan-kegiatan pendukung lain, yaitu penyediaan perlengkapan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengujian berkala kendaraan bermotor, dan audit/inspeksi keselamatan LLAJ, seluruhnya terealisasi 100% sesuai target.

**3) Program Pengelolaan Pelayaran**

Persentase sarana dan prasarana perhubungan laut yang tersedia terealisasi 69% sesuai target Renja 2025, dengan realisasi kumulatif s.d. Tahun 2024 telah mencapai 100% dari kebutuhan dasar dan diarahkan menuju target Renstra Tahun 2027 sebesar 80%; capaian kegiatan pembangunan dan pemeliharaan dermaga tercatat 4 unit sesuai target Tahun 2025 menuju target Renstra 8 unit pada Tahun 2027. Persentase peningkatan jumlah penumpang transportasi laut yang dilayani Dinas Perhubungan ditargetkan 130% dan terealisasi 147% (capaian 113%), dengan jumlah unit transportasi laut yang beroperasi tercapai 7 unit sesuai target. Pencapaian yang jauh melampaui target ini disebabkan oleh perubahan metode perhitungan jumlah penumpang — sebelumnya hanya mencakup penumpang transportasi laut umum, namun sejak Tahun

2025 sesuai Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029, cakupan diperluas dengan memasukkan penumpang angkutan anak sekolah — sehingga berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah penumpang yang tercatat.

Berdasarkan uraian tersebut, dari 8 (delapan) indikator kinerja program yang dievaluasi, 6 (enam) indikator mencapai atau melampaui target Renja Tahun 2025, sedangkan 2 (dua) indikator persentase kelulusan uji KIR dan persentase peningkatan penumpang Trans Batam belum memenuhi target namun tetap berada pada kisaran capaian tinggi (di atas 85%), sehingga secara keseluruhan pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan progres pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029 sampai dengan Tahun 2025 dapat dikategorikan sangat baik dan berada pada jalur (on-track) menuju target akhir Renstra Tahun 2029.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Perhubungan sampai dengan Tahun 2025, mencakup target Renstra Tahun 2027, realisasi sampai dengan Tahun 2024, target dan realisasi Renja Tahun 2025, target Renja Tahun 2026, serta perkiraan realisasi capaian target Renstra, disajikan pada Tabel T.C-29 berikut.

## TABEL II.4
## REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
## DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM S/D TAHUN 2025

*Tabel T.C-29 (saduran Permendagri 86/2017)*

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output) | Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2027 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8=(7/6)* | *9* | *10=(5+7+9)* | *11=(10/4)* |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | |
| **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | |
| **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai SAKIP Dinas Perhubungan (Satuan:Nilai)** | **74,53** | **70,03** | **71,78** | **71,78** | **100%** | **73,53** | **73,53** | **100%** |
| **2.15.01.2.01** | **KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu (Satuan:Persentase)** | **100** | **-** | **-** | **-** | **0%** | **100** | **100** | **100%** |
| 2.15.01.2.01.0001 | SUBKEGIATAN:Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan:Dokumen) | 2 | - | - | - | 0% | 2 | 2 | 100% |
| 2.15.01.2.01.0007 | SUBKEGIATAN:Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan:Laporan) | 3 | - | - | - | 0% | 3 | 3 | 100% |
| **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Pelayanan Kesekretariatan Dinas Perhubungan (Satuan:Nilai)** | **90,48** | **-** | **90,42** | **89,77** | **99%** | **90,45** | **90,45** | **100%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output) | Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2027 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8=(7/6)* | *9* | *10=(5+7+9)* | *11=(10/4)* |
| **2.15.01.2.02** | **KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (Satuan:Persentase)** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100%** | **100** | **100** | **100%** |
| 2.15.01.2.02.0001 | SUBKEGIATAN:Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan:Orang/bulan) | 213 | 87 | 191 | 191 | 100% | 210 | 210 | 100% |
| 2.15.01.2.02.0002 | SUBKEGIATAN:Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan:Dokumen) | 17 | - | 17 | 17 | 100% | 17 | 17 | 100% |
| **2.15.01.2.05** | **KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Satuan: Persentase)** | **100** | **-** | **100** | **100** | **100%** | **100** | **100** | **100%** |
| 2.15.01.2.05.0002 | SUBKEGIATAN:Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Satuan:Paket) | 0 | - | - | - | 0% | - | - | 0% |
| 2.15.01.2.05.0009 | SUBKEGIATAN:Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan:Orang) | 11 | - | 1 | 1 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| **2.15.01.2.06** | **KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Satuan:Persentase)** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100%** | **100** | **100** | **100%** |
| 2.15.01.2.06.0001 | SUBKEGIATAN: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan:Paket) | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 2.15.01.2.06.0002 | SUBKEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan:Paket) | 4 | 5 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output) | Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2027 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8=(7/6)* | *9* | *10=(5+7+9)* | *11=(10/4)* |
| 2.15.01.2.06.0004 | SUBKEGIATAN:<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan:Paket) | 1 | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 2.15.01.2.06.0005 | SUBKEGIATAN:<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan:Paket) | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 2.15.01.2.06.0009 | SUBKEGIATAN:<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan:Laporan) | 30 | 25 | 17 | 16 | 94% | 37 | 78 | 100% |
| **2.15.01.2.07** | **KEGIATAN:<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100%** | **100** | **100** | **100%** |
| 2.15.01.2.07.0002 | SUBKEGIATAN:<br>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Satuan:Unit) | 3 | - | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% |
| 2.15.01.2.07.0005 | SUBKEGIATAN:<br>Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan:Unit) | 44 | 2 | 32 | 32 | 100% | 20 | 54 | 100% |
| 2.15.01.2.07.0006 | SUBKEGIATAN:<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan:Unit) | 22 | 7 | 17 | 17 | 100% | 10 | 34 | 100% |
| **2.15.01.2.08** | **KEGIATAN:<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuh (Satuan:Persentase)** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100%** | **100** | **100** | **100%** |
| 2.15.01.2.08.0002 | SUBKEGIATAN:<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan:Laporan) | 4 | 12 | 12 | 12 | 100% | 5 | 5 | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output) | Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2027 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8=(7/6)* | *9* | *10=(5+7+9)* | *11=(10/4)* |
| 2.15.01.2.08.0004 | SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan:Laporan) | 13 | 13 | 13 | 13 | 100% | 13 | 13 | 100% |
| **2.15.01.2.09** | **KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Satuan:Persentase)** | **100** | **90,55** | **100** | **100** | **100%** | **100** | **100** | **100%** |
| 2.15.01.2.09.0001 | SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Satuan:Unit) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 2.15.01.2.09.0002 | SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan:Unit) | 22 | 20 | 22 | 22 | 100% | 22 | 22 | 100% |
| 2.15.01.2.09.0006 | SUBKEGIATAN: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan:Unit) | 140 | 60 | 90 | 90 | 100% | 147 | 147 | 100 |
| 2.15.01.2.09.0009 | SUBKEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Satuan:Unit) | 0 | - | - | - | 0% | 1 | 1 | 100% |
| **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **Persentase peningkatan sarana dan prarasana perhubungan darat yang tersedia (Satuan:Persentase)** | **80** | 60 | 63 | 65 | 100% | 71 | 71 | 100% |
| **2.15.02.2.01** | **KEGIATAN: Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota** | **Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun (Satuan:Persentase)** | **0** | **100** | **-** | **-** | **100%** | **100** | **100** | **100%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output) | Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2027 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8=(7/6)* | *9* | *10=(5+7+9)* | *11=(10/4)* |
| 2.15.02.2.01.0001 | SUBKEGIATAN: Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Satuan:Dokumen) | 0 | 1 | 0 | - | 100% | - | - | 100% |
| **2.15.02.2.02** | **KEGIATAN: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | **Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan darat yang terbangun (Satuan:Persentase)** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100%** | **100** | **100** | **100%** |
| 2.15.02.2.02.0001 | SUBKEGIATAN: Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Satuan:Unit) | 14 | 2 | 12 | 12 | 100% | 8 | 22 | 100% |
| 2.15.02.2.02.0002 | SUBKEGIATAN: Penyediaan Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Satuan:Unit) | 458 | 183 | 441 | 441 | 100% | 310 | 934 | 100% |
| 2.15.02.2.02.0003 | SUBKEGIATAN: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Satuan:Unit) | 13 | 1 | 6 | 6 | 100% | 1 | 8 | 62% |
| 2.15.02.2.02.0004 | SUBKEGIATAN: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Satuan:Unit) | 79 | 11 | 55 | 55 | 100% | 111 | 177 | 100% |
| **2.15.02.2.06** | **KEGIATAN: Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota** | **Persentas pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan pembangunan ZOSS dalam 1 tahun (Satuan: Persentase)** | **100** | **56** | **100** | **100** | **100%** | **100** | **100** | **100%** |
| 2.15.02.2.06.0013 | SUBKEGIATAN: Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Satuan:Unit) | 2 | 1 | 3 | 3 | 100% | 1 | 5 | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output) | Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2027 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8=(7/6)* | *9* | *10=(5+7+9)* | *11=(10/4)* |
| 2.15.02.2.06.0016 | SUBKEGIATAN: Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Satuan:Dokumen/Unit) | 44 | 41 | 41 | 41 | 100% | 43 | 43 | 100% |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang lulus uji KIR (Satuan:Persentase)** | **59** | 49 | 50 | 47 | 94% | 53 | 53 | 100% |
| **2.15.02.2.05** | **KEGIATAN: Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | **Persentase pelaksanaan kegiatan PKB (Satuan: Persentase)** | **100** | **67** | **100** | **100** | **100%** | **100** | **100** | **100%** |
| 2.15.02.2.05.0001 | SUBKEGIATAN: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Satuan:Unit) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |
| 2.15.02.2.05.0004 | SUBKEGIATAN: Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Satuan:Dokumen) | 7.500 | 5.000 | 5600 | 5600 | 100% | 5000 | 5000 | 100% |
| 2.15.02.2.05.0007 | SUBKEGIATAN: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Satuan:Unit) | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| **2.15.02.2.08** | **KEGIATAN: Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan** | **Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas pada tahun berjalan (Satuan:Persentase)** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100%** | **100** | **100** | **100%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output) | Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2027 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8=(7/6)* | *9* | *10=(5+7+9)* | *11=(10/4)* |
| 2.15.02.2.08.0004 | SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelengaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Satuan:Laporan) | 32 | 32 | 32 | 32 | 100% | 32 | 96 | 100% |
| 2.15.02.2.08.0007 | SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Satuan:Laporan) | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% |
| **2.15.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | **Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang tersedia (Satuan:Persentase)** | **80** | **100** | **69** | **69** | **100** | **73** | **73** | **100%** |
| **2.15.03.2.12** | **KEGIATAN: Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal** | **Jumlah Dermaga yang dibangun dan dipelihara pada tahun berjalan (Satuan:Unit)** | **8** | **4** | **4** | **4** | **100%** | **7** | **7** | **100%** |
| 2.15.03.2.12.0002 | SUB KEGIATAN: Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun (Satuan:Unit) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 100% |
| 2.15.03.2.12.0003 | SUB KEGIATAN: Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara (Satuan:Unit) | 5 | 1 | 4 | 4 | 0% | 3 | 8 | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output) | Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2027 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8=(7/6)* | *9* | *10=(5+7+9)* | *11=(10/4)* |
| **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Pelayanan Kesekretariatan Dinas Perhubungan** | **90,48** | **-** | **90,42** | **89,77** | **99%** | **90,45** | **90,45** | **100%** |
| **2.15.01.2.10** | **KEGIATAN: Peningkatan Pelayanan BLUD** | **Persentase pelayanan BLUD (Satuan:Persentase)** | **100** | **90** | **100** | **100** | **100%** | **100** | **100** | **100%** |
| 2.15.01.2.10.0001 | SUBKEGIATAN: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Satuan:Unit Kerja) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **Persentase peningkatan jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam) (Satuan:Persentase)** | **13** | - | 10 | 8,6 | 86% | 12 | 12 | 100% |
| **2.15.02.2.09** | **KEGIATAN : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Satuan:Persentase)** | **44** | **-** | **40** | **42** | **100%** | **42** | **42** | **100%** |
| 2.15.02.2.09.0003 | SUBKEGIATAN: Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Satuan:Unit) | 73 | 48 | 62 | 50 | 81% | 69 | 69 | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output) | Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2027 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8=(7/6)* | *9* | *10=(5+7+9)* | *11=(10/4)* |
| **2.15.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | **Persentase peningkatan jumlah penumpang Transportasi Laut yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Satuan:Persentase)** | **9** | - | 130 | 147 | 100% | 24 | 24 | 100% |
| **2.15.03.2.06** | **KEGIATAN: Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota** | **Jumlah unit Transportasi Laut yang beroperasi (Satuan:Unit)** | **9** | **-** | **7** | **7** | **100%** | **8** | **100%** | |
| 2.15.03.2.06.0004 | SUB KEGIATAN: Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Satuan:Laporan) | 9 | - | 7 | 7 | 100% | 8 | 8 | 100% |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **Persentase Peningkatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum (Satuan:Persentase)** | **5** | - | 5 | 34 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| **2.15.02.2.04** | **KEGIATAN: Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir** | **Jumlah Penambahan Satuan Ruang Parkir (SRP) Baru (Satuan:SRP)** | **1264** | **-** | **1147** | **593** | **52%** | **1204** | **1797** | **100%** |
| 2.15.02.2.04.0002 | SUBKEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Satuan:Laporan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% |

## 2.4. TELAAH POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajaran apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran berkaitan dengan arah kebijakan RKPD.

Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2027 disajikan pada tabel di bawah ini:

**TABEL II.5**
**TELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD TAHUN 2027**
**PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**

| NO | PENGUSUL | URAIAN PEKERJAAN | LOKASI | STATUS | VOLUME | SATUAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | | (3) | (2) | (5) | | | | |
| 1 | Muhammad Yunus Muda, S.E. | Pembangunan ZoSS | SDN 006 Bengkong | Verifikasi TAPD | 1 | Unit | P5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | **Dapat ditindaklanjuti** sesuai kewenangan Dinas Perhubungan. Pembangunan ZoSS bertujuan meningkatkan keselamatan penyeberangan dan keamanan peserta didik di kawasan sekolah. Pelaksanaan disesuaikan dengan hasil survei teknis dan kemampuan keuangan daerah. |
| 2 | Muhammad Fadhli | Pembangunan ZoSS | SDN 010 Sei Lekop | Verifikasi TAPD | 1 | Unit | P5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | **Dapat ditindaklanjuti** sesuai kewenangan Dinas Perhubungan. Pembangunan ZoSS bertujuan meningkatkan keselamatan penyeberangan dan keamanan peserta didik di kawasan sekolah. Pelaksanaan disesuaikan dengan hasil survei teknis dan kemampuan keuangan daerah. |
| 3 | Muhammad Fadhli | Pembangunan ZoSS | SDN 007 dan SDN 009 Sagulung Kota (Sekolah Berhadapan) | Verifikasi TAPD | 1 | Unit | P5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | **Dapat ditindaklanjuti** sesuai kewenangan Dinas Perhubungan. Mengingat kedua sekolah berada saling berhadapan, pembangunan ZoSS dinilai mendukung peningkatan keselamatan pengguna jalan dan pelajar di kawasan sekolah. Pelaksanaan akan disesuaikan dengan kondisi eksisting dan ketersediaan anggaran. |
| 4 | Muhammad Mustofa, SH, MH | Pembangunan Pedestrian | Jalan Lintas Bukit Kemuning RW 16 Kel Mangsang Kec Sei Beduk | Verifikasi TAPD | 200 | M' | P5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | **Dapat ditindaklanjuti** untuk dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Dinas Perhubungan, dengan tujuan mendukung peningkatan keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. Pelaksanaannya akan disesuaikan berdasarkan kondisi eksisting di lapangan, skala prioritas pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah. |

## 2.5. INOVASI BIDANG URUSAN DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLAYANAN KEPADA MASYARAKAT

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perhubungan Kota Batam mengembangkan sejumlah inovasi pelayanan pada bidang urusan perhubungan, antara lain:

1. Penerapan smart transportation system dan GPS tracking armada Trans Batam untuk memantau dan menurunkan rata-rata waktu tempuh perjalanan;
2. Pemanfaatan teknologi traffic management system (Traffic Light/ATCS) untuk pemantauan dan pengendalian arus lalu lintas secara terintegrasi;
3. Penerapan sistem pembayaran non tunai pada layanan parkir dan retribusi pelabuhan;
4. Penguatan command center perhubungan untuk monitoring pelayanan transportasi secara real time;
5. Peningkatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (operator transportasi, pengelola pelabuhan, dan bandar udara) guna efisiensi layanan dan integrasi antarmoda

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

## 3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2027 disusun selaras dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja Renja Tahun 2025 sebagaimana diuraikan pada BAB II, serta mengacu pada Lampiran Perwako RKPD Kota Batam Tahun 2027. Target Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2027 ditetapkan sebagai berikut:

**TABEL III.1**
**TARGET TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2027**
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**

| TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | TARGET 2027 |
|---|---|---|
| **TUJUAN:**<br>**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Kota Batam** | **Rasio Konektivitas Kota** | **0,861** |
| SASARAN 1:<br>Meningkatnya Konektivitas Darat | Rasio Konektivitas Darat | 0,909 |
| SASARAN 2:<br>Meningkatnya Konektivitas Laut | Rasio Konektivitas Laut | 0,750 |
| SASARAN 3:<br>Meningkatnya Kualitas pelayanan pemerintahan | Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perhubungan | 90,48 |

Tujuan "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Kota Batam" diukur melalui Rasio Konektivitas Kota, dengan target sebesar 0,761 pada Tahun 2027, meningkat dari kondisi awal (baseline) sebesar 0,748 pada Tahun 2025. Pencapaian tujuan ini didukung oleh 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu peningkatan kualitas layanan angkutan darat, peningkatan konektivitas laut, dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan Dinas Perhubungan.

## 3.2. ARAH DAN KEBIJAKAN TAHUN 2027

Arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2027 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025–2030**.** Arah kebijakan tersebut juga memperhatikan kebijakan pembangunan nasional, kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, serta prioritas pembangunan Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027**.**

Dalam mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, arah kebijakan Dinas Perhubungan difokuskan pada penguatan konektivitas wilayah, peningkatan kualitas infrastruktur transportasi, peningkatan keselamatan transportasi, pengembangan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi. Kebijakan ini selaras dengan upaya Pemerintah Pusat dalam mewujudkan sistem transportasi nasional yang andal guna memperkuat daya saing ekonomi dan pemerataan pembangunan. Selanjutnya, arah kebijakan tersebut diselaraskan dengan RKPD Kota Batam Tahun 2027 yang menempatkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Dinas Perhubungan berperan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan transportasi melalui penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan angkutan umum massal, peningkatan pelayanan transportasi laut,

pengembangan fasilitas keselamatan lalu lintas, serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan transportasi.

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Batam turut memberikan dukungan terhadap pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2027, yang terlihat pada tabel berikut:

**TABEL III.2**
**DUKUNGAN PROGRAM DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TERHADAP PRIORITAS NASIONAL**

| PRIORITAS NASIONAL | DUKUNGAN PROGRAM DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TAHUN 2027 | PAGU 2027 |
|---|---|---|
| **PRIORITAS NASIONAL 3:** Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi. | 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 79.248.756.759 |
| | 2. Program Pelayaran | 17.656.704.130 |

Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi, optimalisasi pelayanan angkutan umum Trans Batam, pengembangan konektivitas transportasi darat dan laut, peningkatan keselamatan transportasi, serta pengembangan sistem transportasi berbasis digital. Upaya tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, memperkuat distribusi barang dan jasa, menekan biaya logistik, meningkatkan akses menuju kawasan industri, perdagangan, pariwisata, dan sentra ekonomi, sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendukung penciptaan lapangan kerja.

Selain mendukung prioritas nasional, arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Batam juga selaras dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027, sebagaimana tercantumm pada tabel berikut:

**TABEL III.3**
**DUKUNGAN PROGRAM DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

| PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2027 | DUKUNGAN PROGRAM DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TAHUN 2027 | PAGU 2027 |
|---|---|---|
| **PRIORITAS 2:** Pengembangan Konektivitas Antarwilayah dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta Ketahanan terhadap Bencana | 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 79.248.756.759 |
| | 2. Program Pelayaran | 17.656.704.130 |

Dukungan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Batam terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau khususnya dalam penguatan konektivitas antarwilayah, peningkatan pelayanan transportasi yang aman dan berkeselamatan, pengembangan kawasan ekonomi dan maritim, serta peningkatan daya saing wilayah kepulauan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi, peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan dan transportasi laut, pengembangan simpul-simpul transportasi, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi guna mendukung konektivitas antarwilayah di Provinsi Kepulauan Riau.

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
# DINAS PERHUBUNGAN

## 4.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2027

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2027 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025–2029, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029, hasil evaluasi capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2025 (BAB II), serta hasil penyelarasan dengan pokok-pokok pikiran DPRD dan hasil verifikasi Bappeda Kota Batam terhadap Rancangan Awal Renja.

Rencana kerja dan pendanaan mencakup 3 (tiga) program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dan Program Pengelolaan Pelayaran, dengan total pagu indikatif Tahun 2027 sebesar Rp140.839.777.145,00. Rincian program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja, dan pagu indikatif disajikan pada tabel berikut.

**TABEL IV.1.**
**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**
**TAHUN 2027**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Dukungan | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target 2027 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | Nasional | Provinsi | Daerah | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 140.839.777.145 | | | | | | | | | 208.889.969.754 | |
| 2 | 15 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | 140.839.777.145 | | | | | | | | | 208.889.969.754 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DINAS PERHUBUNGAN | | | | 140.839.777.145 | | | | | | | | | 208.889.969.754 | |
| 2 | 15 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP PD | 78,53 | 74,53 Nilai | 43.934.316.256 | | | | | | | | 76,53 | 57.073.265.350 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD | 90,54 | 90,48 Nilai | | | | | | | | | 90,51 | | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu | | 100 Persentase | 7.155.100 | | | | | | | | 100 | 22.950.600 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 2 Dokumen | 3.876.200 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan | | -Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil | | PEMERINTAH DAERAH | 2 | 11.309.800 | Dinas Perhubungan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Dukungan | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target 2027 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | Nasional | Provinsi | Daerah | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 3 Laporan | 3.278.900 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan | | -Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil | | PEMERINTAH DAERAH | 3 | 11.640.800 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan** | | **100 Persentase** | **27.781.906.676** | | | | | | | | **100** | **36.518.559.028** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 201 Orang/bulan | 27.585.326.676 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan | | -Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil | | PEMERINTAH DAERAH | 220 | 36.307.979.028 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | 16 Dokumen Dokumen | 196.580.000 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan | | -Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil | | PEMERINTAH DAERAH | 17 Dokumen | 210.580.000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya** | | **100 Persentase** | **202.669.800** | | | | | | | | **100** | **113.328.000** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | 1 Paket | 147.292.800 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia; | | -Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil | | ASN DINAS PERHUBUNGAN | 0 | 0 | Dinas Perhubungan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Dukungan | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target 2027 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | Nasional | Provinsi | Daerah | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | 3 Orang | 55.377.000 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan | | -Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil | | PEMERINTAH DAERAH | 12 | 113.328.000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran** | | **100 Persentase** | **202.834.900** | | | | | | | | **100** | **461.711.850** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | 1 Paket | 11.799.500 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan | | -Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil | | PEMERINTAH DAERAH | 3 | 140.544.000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 3 Paket | 20.019.700 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan | | -Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil | | PEMERINTAH DAERAH | 4 | 112.562.000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | 1 Paket | 17.500.000 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan | | -Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil | | PEMERINTAH DAERAH | 1 | 17.500.000 | Dinas Perhubungan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Dukungan | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target 2027 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | Nasional | Provinsi | Daerah | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | 2 Paket | 20.019.700 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan | | -Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil | | PEMERINTAH DAERAH | 2 | 28.755.650 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 36 Laporan | 133.496.000 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan | | -Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil | | PEMERINTAH DAERAH | 32 | 162.350.200 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan** | | **100 Persentase** | **306.107.600** | | | | | | | | **100** | **496.664.530** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | 0 Unit | 0 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan | | -Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil | | PEMERINTAH DAERAH | 0 | 0 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | 34 Unit | 122.376.000 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan | | -Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil | | PEMERINTAH DAERAH | 68 | 193.454.810 | Dinas Perhubungan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Dukungan | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target 2027 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | Nasional | Provinsi | Daerah | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | 20 Unit | 183.731.600 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan | | -Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil | | PEMERINTAH DAERAH | 32 | 303.209.720 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan** | | **100 Persentase** | **1.651.194.240** | | | | | | | | **100** | **1.201.022.520** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | 12 Laporan | 1.220.500.600 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan | | -Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil | | PEMERINTAH DAERAH | 4 | 1.030.503.000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | 13 Laporan | 430.693.640 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan | | -Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil | | PEMERINTAH DAERAH | 13 | 170.519.520 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik** | | **100 Persentase** | **871.394.190** | | | | | | | | **100** | **964.809.609** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | 1 Unit | 42.640.000 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan | | -Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil | | PEMERINTAH DAERAH | 1 | 38.880.000 | Dinas Perhubungan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Dukungan | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target 2027 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | Nasional | Provinsi | Daerah | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | 22 Unit | 694.877.590 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan | | -Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil | | PEMERINTAH DAERAH | 22 | 764.365.349 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | 198 Unit | 133.876.600 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan | | -Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil | | PEMERINTAH DAERAH | 151 | 161.564.260 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **Persentase pelayanan BLUD** | | **100 Persentase** | **12.911.053.750** | | | | | | | | **100** | **17.294.219.213** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | 1 Unit Kerja | 12.911.053.750 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan | | -Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil | | PEMERINTAH DAERAH | 1 | 17.294.219.213 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **Persentase peningkatan sarana dan prarasana perhubungan darat yang tersedia** | **93** | **80 Persentase** | **79.248.756.759** | | | | | | | | **87** | **129.200.360.556** | **Dinas Perhubungan** |
| | | | | | | **Persentase peningkat jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam)** | **14** | **13 Persentase** | | | | | | | | | **13** | | **Dinas Perhubungan** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Dukungan | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target 2027 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | Nasional | Provinsi | Daerah | | | | | |
| | | | | | | **Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang lulus uji KIR** | **70** | **59 Persentase** | | | | | | | | | **65** | | **Dinas Perhubungan** |
| | | | | | | **Persentase Peningkatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum** | **10** | **5 Persentase** | | | | | | | | | **10** | | **Dinas Perhubungan** |
| **2** | **15** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | **Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan darat yang terbangun** | | **100 Persentase** | **5.652.286.700** | | | | | | | | **100** | **11.289.245.113** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | | 10 Unit | 4.258.927.200 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikeatif serta Mengembangkan Agromaritim | -Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana | -Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar | | MASYARAKAT | 14 | 4.580.443.681 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | | 160 Unit | 719.102.500 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikeatif serta Mengembangkan Agromaritim | -Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana | -Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar | | MASYARAKAT | 353 | 5.886.487.842 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Jumlah Prasarana Jalan yang Terrehabilitasi dan Terpelihara | | 6 Unit | 364.430.000 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikeatif serta Mengembangkan Agromaritim | -Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana | -Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar | | MASYARAKAT | 15 | 598.198.590 | Dinas Perhubungan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Dukungan | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target 2027 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | Nasional | Provinsi | Daerah | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | | 105 Unit | 309.827.000 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikeatif serta Mengembangkan Agromaritim | -Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana | -Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar | | MASYARAKAT | 67 | 224.115.000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | **2.04** | | **Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir** | **Jumlah Penambahan Satuan Ruang Parkir (SRP) Baru** | | **1264 SRP** | **10.197.221.600** | | | | | | | | **1328** | **20.000.000.000** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 02 | 2.04 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | 12 Laporan | 10.197.221.600 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikeatif serta Mengembangkan Agromaritim | -Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana | -Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar | | PEMERINTAH DAERAH | 12 | 20.000.000.000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | **2.05** | | **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | **Persentase pelaksanaan kegiatan PKB** | | **100 Persentase** | **807.042.000** | | | | | | | | **100** | **877.894.000** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | | 2 Unit Unit | 178.222.000 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikeatif serta Mengembangkan Agromaritim | -Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana | -Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar | | PEMERINTAH DAERAH | 3 Unit | 203.909.000 | Dinas Perhubungan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Dukungan | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target 2027 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | Nasional | Provinsi | Daerah | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | 7500 Dokumen | 248.520.000 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikeatif serta Mengembangkan Agromaritim | -Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana | -Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar | | PEMERINTAH DAERAH | 7500 | 269.572.000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | | 3 Unit | 380.300.000 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikeatif serta Mengembangkan Agromaritim | -Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana | -Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar | | PEMERINTAH DAERAH | 2 | 404.413.000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | **2.06** | | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | **Persentase pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan pembangunan ZOSS dalam 1 tahun** | | **100 Persentase** | **9.597.565.184** | | | | | | | | **100** | **6.412.320.596** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0013 | Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | | 2 Unit | 403.440.800 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikeatif serta Mengembangkan Agromaritim | -Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana | -Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar | | MASYARAKAT | 2 | 341.894.696 | Dinas Perhubungan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Dukungan | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target 2027 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | Nasional | Provinsi | Daerah | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan | | 4 Dokumen | 9.194.124.384 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikeatif serta Mengembangkan Agromaritim | -Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana | -Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar | | MASYARAKAT | 45 Unit | 6.070.425.900 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | **2.08** | | **Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan** | **Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas pada tahun berjalan** | | **100 Persentase** | **392.689.600** | | | | | | | | **100** | **213.700.000** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 02 | 2.08 | 0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | | 32 Laporan | 392.689.600 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikeatif serta Mengembangkan Agromaritim | -Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana | -Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar | | PEMERINTAH DAERAH | 32 | 213.700.000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | **2.09** | | **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam** | | **44 Persentase** | **52.601.951.675** | | | | | | | | **50** | **90.407.200.847** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 02 | 2.09 | 0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | | 73 Unit | 52.601.951.675 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikeatif serta Mengembangkan Agromaritim | -Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana | -Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar | -Kemiskinan | PEMERINTAH DAERAH | 83 | 90.407.200.847 | Dinas Perhubungan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Dukungan | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target 2027 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | Nasional | Provinsi | Daerah | | | | | |
| **2** | **15** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | **Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang tersedia** | **93** | **80 Persentase** | **17.656.704.130** | | | | | | | | **87** | **22.616.343.848** | **Dinas Perhubungan** |
| | | | | | | **Persentase peningkatan jumlah penumpang Transportasi Laut yang dilayani oleh Dinas Perhubungan** | **3** | **9 Persentase** | | | | | | | | | **3** | | **Dinas Perhubungan** |
| **2** | **15** | **03** | **2.07** | | **Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Unit Transportasi Laut yang beroperasi** | | **9 Unit** | **4.621.579.630** | | | | | | | | **9** | **5.878.812.048** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 03 | 2.07 | 0004 | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | 12 Laporan | 4.621.579.630 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikeatif serta Mengembangkan Agromaritim | -Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana | -Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar | | PEMERINTAH DAERAH | 9 | 5.878.812.048 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **03** | **2.12** | | **Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal** | **Jumlah Dermaga yang dibangun dan dipelihara pada tahun berjalan** | | **8 Unit** | **13.035.124.500** | | | | | | | | **8** | **16.737.531.800** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 03 | 2.12 | 0002 | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun | | 2 Unit | 12.140.923.500 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikeatif serta Mengembangkan Agromaritim | -Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana | -Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar | -Kemiskinan | MASYARAKAT | 3 | 12.923.444.600 | Dinas Perhubungan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Dukungan | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028 | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target 2027 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | Nasional | Provinsi | Daerah | | | | | |
| 2 | 15 | 03 | 2.12 | 0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara | | 2 Unit | 894.201.000 | Kota Batam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikeatif serta Mengembangkan Agromaritim | -Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana | -Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar | -Kemiskinan | MASYARAKAT | 5 | 3.814.087.200 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | | | | TOTAL: | | 140.839.777.145 | | | | | | | 208.889.969.754 | |

## 4.2. DUKUNGAN PROGRAM RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2027 DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Dinas Perhubungan Kota Batam berkomitmen mendukung upaya penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai kewenangan di bidang perhubungan. Dukungan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada strategi nasional yang meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penurunan jumlah kantong kemiskinan.

Peran Dinas Perhubungan dalam penanggulangan kemiskinan diwujudkan melalui penyediaan layanan transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pengembangan jaringan transportasi darat dan laut diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat, membuka akses menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, sehingga secara tidak langsung mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada Tahun 2027, dukungan terhadap pengentasan kemiskinan diwujudkan melalui beberapa program dan kegiatan, antara lain penyediaan layanan angkutan umum perkotaan (Trans Batam) dan penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut yang diperuntukkan bagi masyarakat pada wilayah hinterland yang membutuhkan. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai aktivitas ekonomi dan sosial dengan biaya transportasi yang lebih efisien.

Melalui program tersebut, Dinas Perhubungan Kota Batam berkontribusi dalam mendukung agenda penanggulangan kemiskinan secara terpadu bersama perangkat daerah lainnya. Meskipun tidak secara langsung memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, penyediaan layanan transportasi yang berkualitas merupakan salah satu bentuk intervensi strategis dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan ekonomi, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Batam. Untuk mencapai target tersebut direncanakan program yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 4.2.**
**DUKUNGAN PROGRAM RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2027**

| Perangkat Daerah Pelaksana | Tujuan Program /Strategi | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Target RKPD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Kinerja | Pagu Renja |
| **DINAS PERHUBUNGAN** | | | | | | | | **65.637.076.175** |
| | | **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | | | | | **52.601.951.675** |
| | | **2.15.02.2.09** | | **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **52.601.951.675** |
| | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | 2.15.02.2.09.0003 | | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia (Dengan Satuan:Unit) | 73 | 52.601.951.675 |
| | | **2.15.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | | | | | **13.035.124.500** |
| | | **2.15.03.2.12** | | **Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal** | | | | **13.035.124.500** |
| | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | 2.15.03.2.12.0002 | | | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun (Dengan Satuan:Unit) | 2 | 12.140.923.500 |
| | Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan | 2.15.03.2.12.0003 | | | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara (Dengan Satuan:Unit) | 2 | 894.201.000 |

# BAB V
# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan perhubungan Tahun 2027 diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang didasarkan pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029 dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertera pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 29 Tahun 2026 tentang RKPD Kota Batam Tahun 2027.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Perhubungan Kota Batam adalah Rasio Konektivitas, dengan target sebesar 0,861 pada Tahun 2027. Indikator ini merupakan komposit dari Rasio Konektivitas Darat dan Rasio Konektivitas Laut, yang menjadi ukuran keberhasilan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam, target Tahun 2027 dan realisasi Tahun 2025, disajikan pada tabel berikut.

**TABEL V.1**
**TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) TAHUN 2027**
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**

| INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) | SATUAN | REALISASI 2025 | TARGET 2027 |
|---|---|---|---|
| **III. Aspek Daya Saing Daerah** | | | |
| Rasio Konektivitas | Rasio | 0,805 | 0,861 |

**TABEL V.2**
**TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2027**
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**

| INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) | SATUAN | REALISASI 2025 | TARGET 2030 |
|---|---|---|---|
| Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota | Rasio | 0,805 | 0,861 |
| Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota | Persentase | 19% | 53% |
| Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan | Persentase | 100% | 100% |

IKD dan IKK menjadi alat evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

**TABEL V.3**
**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2027**
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**

| INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | SATUAN | REALISASI 2025 | TARGET 2027 |
|---|---|---|---|
| Rasio Konektivitas Darat | Nilai | 0,900 | 0,909 |
| Rasio Konektivitas Laut | Nilai | 0,583 | 0,750 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perhubungan | Nilai | 89,770 | 90,48 |

Rasio Konektivitas Darat pada Tahun 2027 ditargetkan sebesar 0,909, konsisten dengan capaian yang telah direalisasikan sejak Tahun 2025 (0,900). Rasio Konektivitas Laut ditargetkan meningkat dari 0,583 pada Tahun 2025 menjadi 0,750 pada Tahun 2027 sejalan dengan rencana penambahan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan ditargetkan meningkat secara bertahap dari 90,42 (2025) menjadi 90,48 pada Tahun 2027, dengan realisasi Tahun 2025 tercatat sebesar 89,77 yang menjadi baseline evaluasi tahun berjalan.

# BAB VI
# PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam pada Tahun 2027 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2027 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya.

## 5.1 Catatan Penting

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027 dan berpedoman pada Rencana Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2027, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025 - 2029.

Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2027 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Dinas

Perhubungan Kota Batam Tahun 2027 terdiri atas 3 (tiga) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 35 (Tiga puluh lima) sub kegiatan. Dokumen Rencana Kerja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2027, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2027.

## 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 – 2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2027 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi,

RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah.

2. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN

## 5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2027 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2027 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin komplek dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam, maka seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2027.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2027 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam dalam pelayanan di bidang perhubungan.

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD

**Formulir E.70**
**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah**
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**

| No | Jenis Kegiatan | Hasil Pengendalian dan Evaluasi | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kesesuaian | | Faktor Penyebab | Tindak Lanjut Penyempur |
| | | Ada | Tidak Ada | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja. | ✓ | | | |
| 2, | Pengolahan data dan informasi. | ✓ | | | |
| 3, | Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota. | ✓ | | | |
| 4, | Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota. | ✓ | | | |
| 5, | Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota. | ✓ | | | |
| 6, | Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota. | ✓ | | | |
| 7, | Perumusan tujuan dan sasaran. | ✓ | | | |
| 8, | Penelaahan usulan masyarakat. | ✓ | | | |
| 9, | Perumusan kegiatan prioritas. | ✓ | | | |
| 10, | Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota. | ✓ | | | |
| 10.a. | Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan. | ✓ | | | |
| 10.b. | Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota. | ✓ | | | |
| 10.c. | Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. | ✓ | | | |
| 10.d. | Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota. | ✓ | | | |
| 11, | Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu. | ✓ | | | |
| 12, | Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota. | ✓ | | | |
| 13, | Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju. | ✓ | | | |
| 14, | Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan. | | | | |

Batam, 22 Juli 2026
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**
**KOTA BATAM**

**LEO PUTRA, AP, M.Si**
**Pembina Utama Muda**
**NIP. 19750806 199501 1 001**

WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 513 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2026

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2026 serta efektivitas dalam pekerjaan, perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan Nota Dinas Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Nomor B/127/000.7.2/XI/2025 tanggal 4 November 2025, perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2026 dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan. . .

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);

10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);

13. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam tahun 2024 Nomor 1546);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2026.

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari:

a. Ketua;

b. Sekretaris; dan

c. Anggota.

KETIGA : TIM sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab:

a. Ketua

1. mengoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Tahun 2027; dan
2. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusun.

b. Sekretaris

1. mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
2. melaksanakan kegiatan ketatausahaan Tim Penyusun; dan
3. menerima, mengumpulkan dan menindaklanjuti laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan rencana kerja.

c. Anggota

1. mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025;
2. melakukan analisis kinerja pelayanan di Perangkat Daerah;
3. melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi di Perangkat Daerah;
4. melakukan telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027;
5. merumuskan tujuan, sasaran, dan program kegiatan serta sub kegiatan;

6. merumuskan. . .

6. merumuskan kegiatan prioritas; dan
7. mengikuti pembahasan dengan kemitraan (TAPD Perencanaan dan Penganggaran) terkait kesesuaian rancangan dengan dokumen perencanaan daerah.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU memiliki uraian tugas:

1. menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2027;
2. menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2027;
3. menghadiri forum Perangkat Daerah;
4. menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2027;
5. menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2027;
6. menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2026;
7. menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2026; dan
8. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 19 November 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN XXIV : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 513 TAHUN 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026 DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|---|---|---|
| 1. | Ketua | Kepala Dinas |
| 2. | Sekretaris | Sekretaris Dinas |
| | | Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi |
| 3. | Kelompok Kerja | Kepala Bidang Lalu Lintas |
| | | Kepala Bidang Prasarana Perhubungan |
| | | Kepala Bidang Angkutan Jalan |
| | | Kepala Bidang Laut |
| | | KA. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Parkir |
| | | KA. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Jasa Transportasi |
| 4. | Anggota | Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas |
| | | Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas |
| | | Analisis Kebijakan Ahli Muda |
| | | Kepala Seksi Prasarana Jalan |
| | | Kepala Seksi Prasarana Perlengkapan Jalan |
| | | Analisis Kebijakan Ahli Muda |
| | | Kepala Seksi Angkutan Barang |
| | | Kepala Seksi Angkutan Orang |
| | | Analis Kebijakan Ahli Muda |
| | | Kepala Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran |

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|---|---|---|
| | | Kepala Seksi Kepelabuhanan |
| | | Analis Kebijakan Ahli Muda |
| | | KA. TU Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Parkir |
| | | KA. TU Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Jasa Transportasi |

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD